



## REFORMASI EKONOMI HABIBIE 1998-1999: SEBUAH KEBIJAKAN ATASI KRISIS EKONOMI ORDE BARU

**Mahilda Saidatul Afiyah**

*Mahilda.saidatul.1907316@students.um.ac.id*

<sup>a</sup>Universitas Negeri Malang, Indonesia.

### ARTICLE INFO

*Received: 1<sup>st</sup> December 2021*

*Revised: 11<sup>th</sup> December 2021*

*Accepted: 20<sup>th</sup> December 2021*

*Published: 30<sup>th</sup> December 2021*

### Permalink/DOI

10.17977/um021v15i22021p249-262

Copyright © 2021.  
Sejarah dan Budaya  
Email: [jsb.journal@um.ac.id](mailto:jsb.journal@um.ac.id)  
Print ISSN: 1979-9993  
Online ISSN: 2503-1147

### ABSTRACT

Indonesia's economy experienced a monetary crisis during the leadership of President Suharto where from 1997-1998 there were various economic problems that ended with the decline of President Suharto's power. Leadership turned to the hands of B.J Habibie who tried hard to restore the condition of the national economy through his economic policies. President B.J Habibie focused his economic policy on strengthening and recovering the economy after the monetary crisis. Ada improvement in terms of the economy that experienced inflansi and decreased exchange rate or rupiah exchange rate against the US dollar. On the other hand, there is a decrease in people's purchasing power as well as a lack of public trust in the president who is considered part of the New Order.

### KEYWORDS

economic reform; B.J Habibie; rconomy crysis; the new order

### ABSTRAK

Perekonomian Indonesia mengalami krisis moneter pada era kepemimpinan Presiden Soeharto dimana dari tahun 1997-1998 terjadi berbagai permasalahan ekonomi yang berakhir dengan penurunan kekuasaan Presiden Soeharto. Kepemimpinan beralih ke tangan B.J Habibie yang mana berusaha keras untuk mengembalikan kondisi perekonomian nasional lewat kebijakan ekonominya. Presiden B.J Habibie memfokuskan kebijakan ekonominya pada penguatan serta pemulihan ekonomi pasca krisis moneter yang terjadi. Ada perbaikan dari segi perekonomian yang mengalami inflansi serta penurunan nilai tukar atau kurs rupiah atas dollar AS. Di sisi lain, ada penurunan daya beli masyarakat serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap presiden yang dianggap sebagai bagian dari Orde Baru.

### KATA KUNCI

reformasi ekonomi; B.J Habibie; krisis ekonomi; Orde Baru

## **PENDAHULUAN**

Era orde baru merupakan salah satu potongan sejarah Indonesia yang memiliki banyak sekali peristiwa dalam kancah sejarah Indonesia. Dalam era ini ada banyak kemajuan yang dialami Indonesia meski juga ada banyak pro dan kontra yang muncul dalam setiap kebijakan. Era ini dimulai sejak dikeluarkannya dekrit presiden yang ditandatangani oleh presiden Soekarno yang mana isinya menerangkan pemberian kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk melaksanakan tindakan untuk menjaga keamanan, kedamaian, dan stabilitas negara. Dekrit ini dikenal dengan dokumen Supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret dimana dokumen ini juga menjadi alat pemindahan kekuasaan eksekutif dari Soekarno kepada Soeharto (Tim Penulis Indonesia Investments 2019b). Dari sini Soeharto melakukan kebijakan-kebijakan militer untuk membersihkan kekuatan politik Indonesia yang menandai awal dari era pemerintahan presiden Soeharto, era yang kemudian disebut dengan Orba atau Orde baru. Selain kemajuan yang diakui dalam sejarah, era orde baru juga memiliki sisi kelamnya tersendiri. Beberapa kebijakan yang ada bukan hanya membawa dampak positif namun juga memiliki dampak negatif yang tampak dalam masyarakat. Dalam hal ekonomi Krisis moneter yang terjadi adalah faktor utama keruntuhan era orde baru yang dijaga oleh Soeharto, krisis yang terjadi memaksa Presiden ke 2 Negara Kesatuan Republik Indonesia itu turun dari jabatannya sebagai presiden secara paksa.

Turunnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaannya merupakan salah satu peristiwa bersejarah dalam perkembangan Indonesia, hal ini didasarkan pada fakta lamanya kekuasaan yang menunjukkan seberapa kuat kepemimpinan Soeharto sebenarnya (Aprilia 2013). Presiden Soeharto mengundurkan diri dari kepemimpinannya yang berjalan selama 32 tahun dimana terhitung sejak 11 Maret 1966 dimana beliau mendapat "mandat" kekuasaan. Hal ini menjadi sebuah tanda berakhirnya era orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, namun juga merupakan penanda akan era baru yang diharapkan masyarakat Indonesia yakni era reformasi. Dalam pidatonya Soeharto menyatakan jika mundurnya beliau adalah langkah yang tepat setelah melihat dan menimbang perkembangan dari situasi Indonesia di masa itu. Kericuhan dan ramainya Indonesia dengan tuntutan rakyat yang menginginkan Reformasi dalam berbagai bidang, termasuk didalamnya tuntutan akan pergantian kepemimpinan menjadi faktor utama mundurnya Soeharto (Galih 2018). Faktor lainnya adalah krisis moneter yang menimpa Indonesia telah membuat rakyat mengalami masa-masa yang sangat sulit. Dimana krisis pada tahun 1997 yang mengguncang nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dolar AS menyebabkan naiknya berbagai harga bahan pokok serta bahan bakar premium, padahal disaat yang sama banyak usaha menengah-kebawah mengalami kebangkrutan yang berdampak pada PHK besar-besaran (Aprilia 2013). Hal ini menyebabkan angka pengangguran meningkat drastis dan memberi celah besar peningkatan angka kriminalitas akibat masyarakat yang anarkis. Selain golongan masyarakat, dari golongan mahasiswa juga mengadakan demonstrasi bersama masyarakat untuk meminta penurunan Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden NKRI. Dengan berbagai pertimbangan, diputuskan jika presiden Soeharto akan mundur dari jabatannya sebagai presiden meski masa pemerintahannya

belum usai, dimana pemerintahan Soeharto diserahkan kepada wakilnya saat itu yakni B.J Habibie sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Masa pemerintahan dari B.J Habibie atau Bacharuddin Jusuf Habibie sangatlah singkat, dibandingkan dengan Soeharto yang menjabat hampir selama 32 tahun sejak dilantik pada tahun 1967 (Pratama 2019). B.J Habibie dilantik menjadi presiden pada 21 Mei 1998 setelah presiden Soeharto membacakan pidato pengunduran dirinya sebagai presiden RI di Istana Merdeka pada 09.00 WIB. Dalam pidatonya Soeharto menyebutkan sesuai UUD 1945 pasal 8, B.J Habibie selaku wakil presiden yang menjabat akan menggantikan posisi beliau untuk melanjutkan masa jabatan presiden mandataris 1998-2003 (Indonesia 2011). Meski sempat ada perdebatan mengenai pelantikan dari Presiden Habibie yang dianggap tidak sah sebab dilakukan di gedung Istana bukannya di gedung MPR, secara hukum materiil pelantikan tersebut sah dan konstitusional meskipun secara hukum formal dianggap tidak konstitusional (Moerti 2019). Secara yuridis pengambilan sumpah jabatan wakil presiden menjadi presiden seharusnya dilaksanakan di hadapan MPR, sehingga secara *de facto* B.J Habibie adalah Presiden Indonesia meski secara *de jure* belum. Melihat dari UUD 1945 Pasal 6 ayat 1 dan pasal 8 UUD 1945 serta Tap MPR II/MPR/1973, maka pengangkatan B.J Habibie tidaklah menyalahi aturan apapun. Hanya saja kejadian ini sangat jarang terjadi dan bisa dikatakan kurang etis atau bahkan tidak sah (Krishayanto 2000).

Presiden Habibie sebagai pengganti dari Presiden Soeharto memiliki tugas yang cukup berat untuk memperbaiki kondisi Indonesia yang saat itu dilanda krisis moneter, bisa dikatakan era Habibie memiliki warisan yang harus diselesaikan dari era orde baru. Krisis moneter yang terjadi sejak 1997 menjadi permasalahan utama yang harus segera diselesaikan, sebab reformasi yang menurunkan Soeharto juga didasari krisis moneter yang mengguncang Indonesia. Hal ini mendasari kebijakan-kebijakan Presiden Habibie dalam menyeimbangkan perekonomian Indonesia yang oleng pada tahun 1998, dimana beberapa kebijakan ekonomi segera dikeluarkan untuk menenangkan masyarakat yang menuntut perbaikan di berbagai bidang kehidupan. Bidang ekonomi menjadi fokus utama karena pada bidang ini memiliki dampak yang besar dan luas pada bidang kehidupan lainnya. Karena ekonomi menjadi penopang pergerakan sebuah negara, politik maupun sosial masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan kondisi ekonomi yang terjadi di dalam sebuah negara atau di masyarakat.

Krisis moneter pada era Orde Baru berlanjut pada masa pemerintahan Habibie memaksa pemerintahan yang ada untuk bertindak, dimana hal ini demi keamanan dan kesejahteraan bersama. Namun muncul pertanyaan sebenarnya krisis moneter yang ada pada era orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto seperti apa? Sehingga hal ini mampu menjadi faktor yang menurunkan jabatan serta meruntuhkan kekuasaan yang terbangun selama 32 tahun dalam genggaman Presiden ke 2 Indonesia tersebut. Namun bagaimana kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh B.J Habibie dapat menanggulangi krisis moneter yang dimulai di masa orde baru? Bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut berjalan dan seperti apa respon masyarakat menjadi penting untuk dibahas karena merupakan bagian penting dalam kancah sejarah. Meski kepemimpinan B.J Habibie sebagai Presiden ke 3 NKRI terhitung singkat, namun kebijakan yang dikeluarkan

memiliki andil besar dalam jenjang perubahan yang terjadi di tahun 1998-1999. Perubahan pada masa kepemimpinan beliau yang mana merupakan wujud dari reformasi yang diinginkan masyarakat adalah sebuah hal yang besar, sebab keberadaannya menjadi jembatan antara era orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto dan era reformasi dibawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Penulis berharap dengan dituliskannya permasalahan ini mampu memberikan informasi serta gambaran mengenai bagaimana krisis moneter yang ada di era Orde Baru secara pasti dihadapi dengan kebijakan-kebijakan yang ada di era reformasi lewah kebijakan ekonomi Presiden B.J Habibie. Juga mampu menunjukkan bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan memberikan dampak nyata dalam perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan B.J Habibie selaku presiden ke 3 Indonesia meski dengan masa kepemimpinan yang singkat.

## **METODE**

Penulisan artikel ini merupakan jenis penelitian deskriptif dimana digunakan metode studi pustaka dalam proses pengerjaannya. Metode studi pustaka sendiri merupakan metode pengumpulan bahan dari sumber kepustakaan, baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber kepustakaan didapat dalam bentuk cetak maupun online search dari sumber yang dapat dibuktikan kebenarannya serta didasarkan dari peristiwa dan fakta sejarah. Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku referensi, jurnal ilmiah tercetak maupun e-journal yang terkait dengan pembahasan. Dari bahan yang didapatkan melalui studi pustaka, bahan atau data tersebut di analisa dan disusun serta diolah sebelum di tuliskan dalam bentuk paragraf yang tersusun secara logis dan sistematis. Kesimpulan sendiri didapatkan setelah membaca keseluruhan artikel yang disusun sebelum pokok bahasan didalamnya disatukan dalam sebuah paragraf yang rapi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Krisis Ekonomi Moneter Akhiri Era Orde Baru**

Krisis moneter yang menimpa Indonesia adalah dampak terbesar yang dirasakan masyarakat akibat berbagai kebijakan ekonomi pemerintah. Berbagai permasalahan muncul dalam rentang waktu dua tahun saat inflasi mencapai titik tertingginya, yang mana menimbulkan berbagai problema baru seperti komplikasi penyakit manusia. Dimana masalah yang ada saat terlambat ditangani atau kurang tepat penanganannya menyebabkan masalah lain muncul sebelum masalah sebelumnya terselesaikan, menyebabkan penumpukan permasalahan dan tugas pagi pemerintah sendiri. Krisis moneter yang menimpa Indonesia bermula dari krisis moneter regional di kawasan Asia Tenggara saat Thailand melakukan devaluasi mata uang Bath (Ariadi and Sugiarto 1999). Dampaknya pada Indonesia muncul saat nilai tukar rupiah mengalami penurunan tajam pada awal tahun 1998. Hal ini memicu krisis akibat depresiasi nilai tukar rupiah yang berdampak pada keseluruhan bidang, terutama sektor perbankan yang menjadi pusat ekonomi masyarakat. Disinilah pemerintah mengambil kebijakan mendasar yang terdiri dari stabilitas moneter, pengetatan likuiditas, penghematan dan penyesuaian struktural

lewat liberalisasi perdagangan dan intervensi (Saidi 1998). Krisis ekonomi tetap terjadi meski dasar fundamental ekonomi Indonesia pada masa itu dipandang kuat dan disanjung oleh Bank Dunia, namun sekali lagi kelemahan struktural menjadi masalah utama yang perlu diperhatikan lebih (Tarmidi 19991).

Dampak yang harus dibayar pemerintah dalam krisis ini tidaklah main-main, sebab harga yang dibayarkan adalah keruntuhan kekuasaan Presiden Soeharto yang sudah bertahan selama 32 tahun (Ariadi and Sugiarto 1999). Krisis berkepanjangan menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam pembangunan nasional yang mengiringi kebijakan ekonomi yang ada. Strategi yang digunakan dengan mengutamakan pertumbuhan yang ditopang oleh negara-negara luar tidak efektif menahan gelombang eksternal Indonesia, memperlihatkan *there is something wrong* dalam proses pembangunan nasional yang digencarkan. Pembangunan yang didasarkan pada trilogi pembangunan tidak sesuai dengan konsep REPELITA atau Rencana Pembangunan Lima Tahun yang disusun pemerintah, karena lebih bertumpu pada stabilitas nasional, pertumbuhan, dan pemerataan. Ketiga poin dalam trilogi pembangunan sangat mengakar dalam kepemimpinan Presiden Soeharto di era Orde Baru, dimana dengan menerapkan ketiganya pemerintah berharap pada konsepsi ideal serta implikasi dari trilogi pembangunan yang jalankan. Dimana dengan mengendalikan stabilitas nasional akan menciptakan lingkungan yang baik baik perekonomian sebelum pemerintah menarik investor asing untuk merangsang perekonomian nasional, setelahnya kesejahteraan akan diratakan ke seluruh wilayah Indonesia dengan baik (Mayrudin, 2018). Dalam prosesnya pemerintah Indonesia tidak hanya mengandalkan pendanaan dalam negeri tapi juga luar negeri, sebab akumulasi dana dalam negeri tidak mencukupi biaya pembangunan yang dirancang. Ketidakmampuan dalam menutupi kekurangan pendanaan dengan dana negara disebabkan besarnya dana yang disiapkan tidaklah seimbang dengan rencana kegiatan investasi (*Saving-investment gap*), hal ini menjadi dasar kegagalan atau ketidaksesuaian pelaksanaan rencana investasi (Woyanti and Setiawan 2006).

Jika diperhatikan lebih lanjut, kegagalan pemerintah yang menyebabkan krisis moneter bukanlah ada pada dasar fundamental perekonomian Indonesia, sebab dasar yang digunakan kuat dan seimbang. Permasalahan datang dari hutang negara atau utang swasta luar negeri yang mencapai angka tinggi, yang mengalami kebobolan bukanlah rupiah namun luar negeri dimana nilai tukar dollar AS mengalami *Overshooting* yang jauh dari nilai nyata (Tarmidi 19991). Nilai tukar mengalami kemerosotan dan ini menjadi akibat dari serbuan yang tiba-tiba terhadap dollar AS dan jatuh tempo dari utang swasta luar negeri. Namun hal ini tidak lantas menyebabkan utang luar negeri serta penurunan tajam nilai tukar menjadi faktor penentu dalam krisis ini. Meski tidak bisa dipungkiri pula dengan adanya pendanaan yang berasal dari luar negeri dalam hal ini utang luar negeri serta penanaman modal asing yang dilakukan pemerintah memberikan pengaruh positif dalam pertumbuhan ekonomi serta pembangunan nasional, meski pengaruh positif ini juga beriringan dengan pengaruh negatifnya. Ada beberapa faktor lain yang memiliki andil dalam krisis ekonomi moneter ini. Salah satunya adalah masalah sistem devisa yang dilaksanakan oleh Indonesia. Sistem yang mana memberikan kebebasan tanpa adanya pengawasan ini menjadikan celah dalam keluar-masuknya devisa yang ada. Dimana arus

modal serta valas mengalir dengan mudahnya tanpa memperdulikan jumlah yang keluar-masuk. Faktor lainnya adalah kebijakan deregulasi atau liberalisasi yang terjadi pada tahun 1983-1988, dimana kebijakan ini menyebabkan penarikan investor setelah peristiwa penurunan tajam harga minyak dunia. Undang-undang yang ditetapkan membuat aturan Indonesia mengenai arus modal menjadi sangat liberal bahkan dalam kancah internasional. Keikutsertaan pemerintah dalam perekonomian Indonesia mempertajam masalah yang ada, hal ini dikarenakan kebijakan yang ada malah membatasi ruang gerak masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi (Setiawan 2009). Hal ini dapat dilihat setelah peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) yang terjadi pada 15-16 Januari 1974 yang menyebabkan pemerintah Orde Baru mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih ketat mengenai investasi asing, meskipun hal ini juga memberikan peluang pasar yang besar untuk masyarakat pribumi dengan kebijakan yang memberikan perlakuan khusus bagi mereka (Tim Penulis Indonesia Investments 2019a). Kebijakan ekonomi makro yang dilakukan pemerintah memang mampu menunjukkan kestabilan “semu” inflasi yang menjadi fokus pemerintahan, tapi ini mengakibatkan terabaikannya pertumbuhan ekonomi pada sektor yang nyata dan akhirnya memberi celah pada benih kehancuran ekonomi nasional.

Inflasi yang menyerang perekonomian Indonesia telah mengacaukan sistem moneter yang ada, dimana hal ini mampu melumpuhkan berbagai macam sektor perekonomian tak terkecuali sektor produksi atau industri. Terjadi penurunan signifikan akan produksi dalam negeri sejak tahun 1960 sampai tahun 1966. Bukan sekedar menaikkan harga pangan, barang, dan jasa tapi juga menuntut peningkatan upah pekerja serta biaya alat dan produksi. Ini yang menjadi jawaban akan berhentinya beberapa usaha masyarakat akibat krisis moneter. Biaya perawatan alat produksi diiringi dengan penurunan kualitas hasil produksi semakin memperburuk keadaan, sebab dengan penurunan kualitas dan kuantitas yang dihasilkan memaksa para pemilik usaha memikirkan solusi. Jika sudah mencapai batasnya maka para pemilik usaha akan menutup usahanya dan ini menjadi sebab kemacetan dalam pembangunan sarana dan prasarana produksi dalam perekonomian nasional. Inflasi tinggi yang tidak ditopang dengan pembangunan yang seimbang memperparah kemacetan perekonomian, sebab hal ini akan mempengaruhi nilai produk domestik bruto yang mengalami sedikit sekali kenaikan. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi tertinggal saat rata-rata peningkatan produk domestik bruto hanya mencapai 1,4% pertahun, itu jelas berada dibawah tingkat pertumbuhan rata-rata penduduk yang bisa mencapai 2,3% per tahun (Setiawan 2009).

Padahal kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru ditujukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi makro dimana inflasi (Harga baik) atau deflasi (harga turun) dengan tujuan stabilitas harga di akhir. Kebijakan moneter sendiri adalah bagian dari kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pemasukan kas negara atau pendapatan nasional dengan mengubah total peredaran uang di masyarakat. Pemerintah harus memperbaiki sistem keuangan kredit sebagai langkah awal kebijakan moneter yang mana sama dengan politik moneter yang berusaha memperbaiki keseimbangan moneter di Indonesia. Dalam prakteknya di Indonesia, mekanisme transmisi kebijakan moneter yang diberlakukan oleh bank Indonesia sebagai pemegang otoritas kegiatan

perekonomian dan keuangan adalah topik hangat dalam perbincangan masyarakat, sebab sesuai UU. No. 23 tahun 1999 yang diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2004 menjelaskan tujuan BI atau Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah serta kestabilan harga atau inflasi (Nugroho et al. 2020).

Di akhir pemerintahan Orde Baru, faktor lain selain krisis moneter juga dikarenakan desakan dan tuntutan masyarakat serta golongan mahasiswa agar dilakukan reformasi di berbagai bidang kehidupan. Krisis moneter membawa banyak dampak buruk dalam kondisi ekonomi Indonesia, pasalnya terjadi kelaparan di berbagai pelosok tanah air ini menyulut simpati beberapa golongan diantaranya golongan mahasiswa. Terutama dengan adanya isu KKN (korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang ada dalam pemerintahan Orde Baru, disamping tuntutan reformasi ekonomi, politik, serta hukum. Terlahirlah gerakan mahasiswa yang mana merupakan implementasi gerakan sosial mahasiswa dari pemikiran mahasiswa, di mana gerakan ini menuntut perbaikan dalam tatanan pemerintahan Orde Baru serta reformasi untuk Indonesia (Hermawan 2018). Gerakan ini hadir akibat guncangan dalam sistem politik nasional yang menjadi bukti kelemahan posisi negara atas rakyatnya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan gejala kemiskinan yang terjadi secara massal atau tersebar baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan sekalipun, sarana dan prasarana ekonomi mengalami kehancuran dimana implikasinya adalah pada kehancuran ekonomi serta peningkatan hutang diikuti hilangnya fungsi nyata sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, serta modernisasi di negara Indonesia.

Hal lain yang memaksa presiden Soeharto adalah peristiwa Mei 1998, peristiwa ini adalah sebuah kerusuhan yang terjadi pada 13-14 Mei 1998. Kerusuhan dipicu kondisi ekonomi, politik, dan sosial dari Indonesia yang mengalami pergolakan dan krisis berkepanjangan, terutama krisis ekonomi yang memaksa banyak pihak yang kecewa mengajukan demo dan protes. Pemicu paling besar adalah kejadian kejadian penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998, saat itu para mahasiswa berkumpul di Universitas Trisakti dan mendesak demonstrasi di luar kampus (Sunariyah 2016). Yang tidak mereka duga adalah tanggapan dari aparat yang menembaki kerumunan tersebut, menyebabkan 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas akibat tembakan aparat berwajib. Sebenarnya pada 14 Mei 1998 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, tepatnya di Bogor, Tangerang, dan Bekasi berdatangan menuju Kampus Trisakti untuk menyatakan duka cita atas 4 korban meski akhirnya sempat diwarnai kerusuhan. Pada 14 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan siap mengundurkan diri dihadapan masyarakat Indonesia yang berada di Kairo, padahal di Indonesia sedang terjadi kerusuhan dimana penjarahan besar-besaran terjadi di beberapa pusat perbelanjaan. Peristiwa ini menyebabkan kurang lebih 500 orang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi selama kerusuhan terjadi (Nurmalaningrum and Dewantara 2018). Peristiwa ini juga memakan banyak korban dari etnis Tionghoa, menyebabkan banyak warga etnis Tionghoa memilih untuk meninggalkan Indonesia dan mencari tempat yang "aman" baik sementara waktu atau seterusnya. Namun hal ini hanya berlaku untuk golongan menengah keatas, sekitar 80% masyarakat Tionghoa tetap berada di Indonesia sebab lahir dan besar di Indonesia dan

sebagian besar belum pernah meninggalkan Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai tempat satu-satunya yang mereka kenal sebagai tempat kelahiran dan hidup, meski kondisi yang ada harus dihadapi baik dan buruknya (Lan 2010). Hal ini sebenarnya menunjukkan adanya “masalah” yang tidak hanya sekedar anti-Tionghoa di masa Orde Baru, menunjukkan adanya masalah dalam pemerintahan Orde Baru yang mendorong kekerasan dan antipati terhadap warga etnis Tionghoa secara menyeluruh meskipun jelas tidak dapat dibenarkan mereka mendapat perlakuan anti-Tionghoa tersebut karena mereka juga warga negara Indonesia yang sah.

### **Kebijakan Ekonomi Presiden B.J Habibie**

B.J Habibie atau Bacharuddin Jusuf Habibie merupakan presiden Indonesia yang ke 3 dan merupakan presiden dengan masa jabatan tercepat yang ada dalam sejarah Indonesia. Beliau memerintah selama 17 bulan terhitung sejak turunnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999, meski demikian pemerintahan Presiden Habibie ternyata menciptakan reformasi besar-besaran dalam kancah Sejarah Indonesia (Utami 2021). Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau yang mana merubah banyak tatanan yang sebelumnya tidak ada atau dilarang pada masa orde baru dibawah pimpinan Presiden Soeharto. Merubah bukan hanya memberikan tambahan atau menambal kekurangan yang ada saja, tapi memperbaiki sistem yang ada dan berusaha memaksimalkan tujuan dan tugas yang ada. Beliau melakukan re-alignment dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, serta sosial untuk menyelesaikan permasalahan yang ada para era Orde Baru. Dari bidang politik, pemerintahan, sosial, juga ekonomi menunjukkan perubahan yang pasti, meski ada beberapa kebijakan yang tetap memiliki pro dan kontranya tersendiri. Dari semua bidang yang mengalami reformasi, bidang ekonomi menunjukkan kemajuan yang nyata dari kebijakan-kebijakan yang ada, dimana tujuan kebijakan-kebijakan tersebut untuk menanggulangi krisis moneter yang muncul sejak akhir masa orde baru. B.J Habibie menjadi presiden di saat Indonesia mengalami krisis moneter, dimana kurs atas uang rupiah saat itu mengalami penurunan tajam atas dollar AS sejak pertengahan 1997 (Dewi 2019). Sehingga kepemimpinan Presiden B.J Habibie merupakan sebuah babak baru dalam perekonomian serta kepemimpinan atas dasar reformasi.

B.J Habibie sendiri sebenarnya merupakan seorang ilmuwan yang sudah berada dalam ranah Internasional, sehingga dalam pemerintahannya beliau memperkenalkan seperti apa reformasi pasca Soeharto. Dimana Presiden B.J Habibie harus menghadapi lima isu terbesar di awal pemerintahannya yang diwarnai suasana politik dan ekonomi yang berantakan. Salah satunya adalah isu masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang mengalami Krisis moneter (Rickles 2008). Apalagi pada pertengahan 1998 sampai akhir Juni 1998 menyebabkan 56% dari jumlah penduduk saat itu berada dibawah garis kemiskinan. Presiden B.J Habibie memfokuskan kebijakannya pada penguatan serta pemulihan ekonomi pasca krisis moneter yang terjadi, dimana beliau memulai dengan memulihkan kegiatan investasi, perdagangan, serta kinerja dalam sektor perbankan dan bisnis (Hakim and Giovani 2009). Selama pemerintahannya



Presiden B.J Habibie menghasilkan setidaknya 66 Undang-Undang yang mana salah satunya menegaskan arah perekonomian Indonesia dengan lebih jelas.

Beberapa kebijakan dikeluarkan sebagai upaya dalam mengembalikan kondisi ekonomi Indonesia yang terpuruk, minimal mampu memberikan perbaikan dalam masalah yang muncul akibat krisis moneter yang muncul pada tahun 1997-1998. Salah satu masalah yang muncul akibat krisis moneter di era Orde Baru adalah PHK yang dilakukan banyak usaha rakyat yang mengalami kebangkrutan, hal ini menyebabkan meningkatnya angka pengangguran yang juga meningkatkan angka kriminalitas. Kenaikan angka kriminalitas disebabkan kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk, sehingga banyak orang memilih jalur cepat dalam mencari penghidupan bagi dirinya dan juga keluarganya. Kebijakan Presiden B.J. Habibie dilakukan bertujuan untuk memulihkan perekonomian nasional Indonesia yang terguncang sekaligus menanggulangi permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai komplikasi krisis moneter.

Kebijakan Presiden B.J Habibie salah satunya adalah dengan mengesahkan Undang-Undang yang mendorong efisiensi kegiatan ekonomi Indonesia, meski hasilnya memang tidaklah signifikan namun pertumbuhan ekonomi penduduk yang sebelumnya mencapai angka -7,7% nyatanya bisa meningkat menuju angka 5% (Dewi 2019). Krisis ekonomi yang diawali dengan penurunan nilai tukar sekitar Juli 1997 menjadi faktor utama mengapa Undang-Undang ini disusun, dimana menjadi Undang-Undang pertama yang secara eksplisit atau tertulis menerangkan keberadaan Bank Indonesia sebagai lembaga Independen (Murdadi 2012). Dengan independensi ini diharapkan Bank Indonesia mampu menjadi lembaga yang menjaga stabilitas moneter untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan lainnya adalah dengan memutar badan penyehat perbankan nasional atau BPPN serta lembaga yang bertugas memantau dan menyelesaikan hutang luar negeri Indonesia, perbaikan-perbaikan lain dalam hal fiskal dan moneter terus digiatkan sebaik mungkin. Dalam memperbaiki perekonomian nasional, Presiden B.J Habibie melakukan beberapa hal diantaranya adalah merekapitulasi perbankan, merekonstruksi perekonomian nasional yang ada, melikuidasi bank yang memiliki masalah, serta menaikkan nilai tukar rupiah yang menurun (Wijaya and Permatasari 2018).

Ada pengesahan Undang-Undang mengenai perbankan yakni perubahan UU No. 7 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998 (Wijaya and Permatasari 2018). Ada juga kebijakan mengenai Bank Indonesia dimana menurut Presiden B.J Habibie yang didasarkan pada UU No.13 Tahun 1968 tugas BI adalah sebagai lembaga yang membantu tugas presiden di dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan moneter, sehingga gubernur Bank Indonesia dapat dianggap sebagai *ex-officio*-kabinet yang mana juga berlaku untuk kedudukan jaksa agung (Habibie 2006). Sehingga Presiden B.J Habibie menyusun dan mengesahkan Undang-Undang mengenai perbankan agar Bank memaksimalkan keberadaan dan tugasnya, yakni UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak-pihak lain. Hal berdampak baik sebab independensi ini mampu menciptakan peningkatan kurs rupiah terhadap dolar AS yang

sebelumnya menurun drastis. Presiden B.J Habibie juga memberikan kebebasan bagi WNA atau Badan Hukum Asing untuk mendirikan Bank Umum dengan WNI atau Badan Hukum Indonesia, hal ini tertera dalam pasal 22 ayat (1) huruf b (Syam 2010).

Ditambah lagi dengan kebijakan yang melarang adanya monopoli dalam perekonomian nasional dengan disusunya Undang-Undang larangan monopoli menciptakan kondisi perekonomian yang meningkat lebih dari pada sebelumnya (Dewi 2019). UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik politik serta persaingan tidak sehat dan UU No. 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen meski belum maksimal menunjukkan manfaat dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan UU tersebut mengurangi keuntungan pribadi dari sebuah perusahaan yang dikelola secara mandiri serta mengurangi pengelolaan pasar secara otoriter, hal ini sudah barang tentu menguntungkan masyarakat kecil yang menjadikan Habibie lebih disukai ketimbang Presiden Soeharto. Meski demikian bukan berarti larangan ini seratus persen baik bagi kepemimpinan Presiden B.J Habibie, masyarakat masih ada yang menganggap keberadaan Presiden B.J Habibie sebagai Presiden bayangan Soeharto yang menjadikan masyarakat sulit mempercayai beliau.

Kebijakan lainnya dapat dilihat dari terjunnya Presiden B.J Habibie dalam urusan Internasional sejak ia menjabat Presiden Indonesia, sebenarnya pada saat beliau menjadi wakil dari presiden Soeharto tugas ini sudah berada ditangan beliau. Beliau bertanggung jawab atas pengembangan dan peningkatan hubungan ekonomi eksternal negara disamping menjalin hubungan dengan luar negeri untuk meningkatkan kemampuan Sains dan Teknologi (Hamonangan 2019). Pada masa pemerintahan Presiden B.J Habibie sebenarnya menunjukkan penurunan dominasi atau kekuasaan pemerintah dan negara dalam penentuan beberapa kebijakan ekonomi, meskipun tidak dipungkiri pula terjadi perubahan yang mumpuni dalam bidang ekonomi dari kebijakan Pemerintah untuk perbaikan perekonomian nasional yang sempat anjlok bahkan krisis (Perdana 2001).

Apalagi Presiden B.J Habibie yang juga memiliki kewajiban memimpin pemerintahan yang sedang dalam kondisi transisi sesungguhnya dalam kondisi politik yang kurang baik, sebab gejolak politik masih sangat terasa sebagai buntut dari peristiwa 21 Mei 1998 (Maghfuri, 2020). Sehingga sangatlah penting bagi Presiden B.J Habibie untuk segera menyiapkan dan melaksanakan reformasi yang dituntut masyarakat Indonesia secara mendasar dan menyeluruh, karena posisi kepemimpinan Presiden B.J Habibie saat itu bagaikan gunung berapi yang siap meletus jika salah dalam menentukan langkah. Salah satu peristiwa yang juga termasuk dalam peristiwa Mei 1998 adalah peristiwa 13-14 Mei 1998 dimana terdapat fakta bahwa etnis Tionghoa yang mendapat dampak dari kerusuhan yang merupakan akibat berkelanjutan krisis ekonomi era Orde Baru. Tahun 1998 pada masa pemerintahan Presiden B.J Habibie, beliau meneken Inpres atau Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 26 mengenai penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi untuk menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, sehingga masyarakat Tionghoa mendapat tempat yang sama dengan warga negara lainnya (Agustina 2019). Hal ini juga yang menjadi faktor peningkatan ekonomi di masyarakat, sebab dengan tidak adanya diskriminasi dalam berbagai hal termasuk ekonomi menyebabkan lebih terbukanya masyarakat dalam melakukan ekonomi secara tepat.

Presiden B.J Habibie sendiri merupakan orang yang memiliki konsep industri padat karya, dimana konsep ini diterapkan lewat penerapan produk prioritas yang mana dengan teknologi-teknologi canggih yang menjadi nilai plus dalam sebuah produksi. Konsep tersebut didasarkan pada keuntungan komparatif dengan orientasi pasar bebas dan ekspor produk-produk padat karya serta sumber daya alam (Gie 1994). Sesuatu yang sebenarnya bisa dengan mudah didapatkan di Indonesia dilihat dari SDM serta SDA yang melimpah, yang dibutuhkan adalah pengelolaan dan kualitas yang memadai dalam pertarungan ekonomi.

Dengan demikian inti dari reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Presiden B.J Habibie dapat dikatakan sebagai perbaikan atas krisis ekonomi moneter yang terjadi pada masa Orde Baru serta mengenalkan ekonomi yang lebih baik terhadap perekonomian nasional kedepannya. Kebijakan yang ada ditujukan untuk mengendalikan perekonomian yang kacau agar menjadi seimbang dan dapat berjalan dengan tenang, dimana dalam prosesnya ada banyak pro dan kontra akibat posisi B.J Habibie yang dianggap tidak sah sebagai presiden ataupun pendapat dirinya yang merupakan bagian dari era Orde Baru. Meski demikian pada masa kepemimpinan Presiden B.J Habibie ini juga memiliki kelemahan dimana daya beli masyarakat Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan, selain itu ada resiko yang tinggi usaha dalam negeri yang menyebabkan pemulihan kepercayaan akan perekonomian yang lebih baik berjalan lambat (Hakim and Giovani 2009). Diluar kekurangan tersebut kebijakan yang ada memberikan dampak yang baik dan membuka peluang perekonomian yang jauh lebih baik kedepannya serta untuk generasi selanjutnya..

## **KESIMPULAN**

Orde Baru yang mana merupakan masa kekuasaan Presiden Soeharto adalah era yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia lewat pencapaian serta pro kontra yang ada didalamnya. Turunnya Presiden Soeharto dari posisinya menandai berakhirnya Orde Baru, dimana hal tersebut diwarnai kericuhan di kalangan masyarakat Indonesia karena tuntutan rakyat yang menginginkan Reformasi dalam berbagai bidang, termasuk didalamnya tuntutan akan pergantian kepemimpinan. Faktor lainnya adalah krisis moneter yang menimpa Indonesia telah membuat rakyat mengalami masa-masa yang sangat sulit. Kepemimpinan digantikan oleh B.J Habibie selaku wakil Presiden Soeharto yang meski hanya bertugas selama 17 bulan, tugas yang diemban beliau tidaklah mudah sebab kondisi Indonesia yang tengah dilanda krisis moneter. Krisis yang bermula dari krisis moneter regional di kawasan Asia berdampak pada Indonesia.

Di Indonesia krisis ini dikarenakan pembangunan yang didasarkan pada trilogi pembangunan tidak sesuai dengan konsep REPELITA serta hutang negara atau utang swasta luar negeri, ditambah dengan inflasi yang menyerang perekonomian Indonesia telah mengacaukan sistem moneter yang ada. Peristiwa Mei 1998 juga berperan apalagi kerusuhan yang terjadi pada 13-14 Mei 1998. Presiden B.J Habibie memfokuskan kebijakannya pada penguatan serta pemulihan ekonomi pasca krisis moneter yang terjadi. Salah satunya adalah dengan mengesahkan Undang-Undang yang mendorong efisiensi kegiatan ekonomi Indonesia serta membuat badan penyehat perbankan

nasional atau BPPN. Kelemahan dari kebijakan ekonomi Habibie terletak pada daya beli masyarakat Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan, selain itu ada resiko yang tinggi usaha dalam negeri yang menyebabkan pemulihan kepercayaan akan perekonomian yang lebih baik berjalan lambat.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku dan Jurnal

- Agustina, Reza. 2019. "Dampak Kerusuhan Mei 1998 Terhadap Kehidupan Etnis Cina Di Kota Palembang Tahun 1998-2003." Universitas Sriwijaya. <https://repository.unsri.ac.id/2867/>.
- Aprilia, Lilik Eka. 2013. "Berakhirnya Pemerintahan Soeharto Tahun 1998." Universitas Jember. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/57270?>.
- Ariadi, Nanang E., and Dwi Sugiarto. 1999. "Studi Sistem Ekonomi Islam Sebagai Sistem Ekonomi Alternatif (Telaah Kritis Terhadap Pola Kebijakan Ekonomi Orde Baru)." *Bulein Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 2 2 (1): 23-46. <https://bmeb-bi-org/index.php/BEMP/article/view/190?>
- Dewi, Indah Damaiyanti. 2019. "Kebangkitan Perekonomian Indonesia Dalam Pemikiran Bacharuddin Jusuf Habibie 1998-1999." Universitas Jambi. [https://repository.unja.ac.id/8521/1/upload\\_repository.pdf](https://repository.unja.ac.id/8521/1/upload_repository.pdf).
- Galih, Bayu. 2018. "21 Mei 1998, Saat Soeharto Dijatuhkan Gerakan Reformasi ..." Kompas.Com : Jernih Melihat Dunia 2. 2018. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2018/05/21/06480851/21-mei-1998-saat-soeharto-dijatuhkan-gerakan-reformasi?>
- Gie, Kwik Kian. 1994. *Analisis Ekonomi Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Habibie, Bacharuddin Jusuf. 2006. *Detik-Detik Yang Menentukan. Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta: THC Mandiri.
- Hakim, Abdul, and Guswildan Giovani. 2009. "Perbandingan Perekonomian Dari Masa Soekarno Hingga Susilo Bambang Yudhoyono (1945 - 2009)." *Journal of Innovation in Business and Economics* 3 (2): 161-80. <http://202.52.52.22/index.php/jibe/article/view/2238>.
- Hamonangan, Iskandar. 2019. "Reformasi Menuju Demokrasi : Kebijakan Luar Negeri Masa Presidensi B . J Habibie," no. April: 1-3. <http://rec-id.org/wp-content/uploads/2018/12/Reformasi-Menuju-Demokrasi-Kebijakan-luar-negeri-masa-presidensi-B.J-Habiie.pdf>.
- Hermawan, Agus. 2018. "GERAKAN MAHASISWA MENUJU REFORMASI 1998." UIN Gunung Djati.
- Indonesia, Tim Nasional Penulisan Sejarah. 2011. "Sejarah Nasional Indonesia VI : Zaman Jepang Dan Zaman Republik." In , edited by Saleh A. Djamhari, Volume 5, 808. Jakarta: Balai Pustaka.

- Krishayanto, E. 2000. "Permasalahan Hukum Sumpah Jabatan B.J Habibie Sebagai Presiden III Republik Indonesia." *Perspektif* V (1): 1-14. <http://www.jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/228>.
- Lan, Thung Ju. 2010. *Setelah Air Mata Kering. Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998*. Edited by Thung Ju Lan and I. Wibowo. Cetakan ke. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. [https://books.google.co.id/boks?hl=id&lr=&id=ac-xhxQXfpoC&oi=fnd&pg=PP7&dq=info:NpBONwURLqAJ:scholar.google.com/&ots=keD9oc9nYQ&sig=2JcDyvh4YZ4CPBeOSD90tGZCXxl&redir\\_esc=y#v=onepae&q&f=false](https://books.google.co.id/boks?hl=id&lr=&id=ac-xhxQXfpoC&oi=fnd&pg=PP7&dq=info:NpBONwURLqAJ:scholar.google.com/&ots=keD9oc9nYQ&sig=2JcDyvh4YZ4CPBeOSD90tGZCXxl&redir_esc=y#v=onepae&q&f=false).
- Maghfuri, Amin. 2020. "ANALISIS POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA AWAL ORDE REFORMASI ( 1998-2004 )." *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8 (1): 14-26. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/view/614>.
- Mayrudin, Yeby Ma'asan. 2018. "Menelisik Program Pembangunan Nasional Di Era Pemerintahan Soeharto." *Journal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah)* 4 (1): 71-90. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/gov/article/viewFile/1301/889?>
- Moerti, Wisnoe. 2019. "Cerita Pelantikan Presiden: Habibie, Satu-Satunya Yang Dilantik Di Istana." *Merdeka.Com*. 2019. <https://m/merdeka.com/peristiwa/cerita-pelantikan-presiden-habibie-satu-satunya-yang-dilantik-di-istana.html?page=3?>
- Murdadi, Bambang. 2012. "Independensi Bank Indonesia Di Persimpangan Jalan." *Value Addedi Majalah Ekonomi Dan Bisnis* 9 (1): 1-15. <https://103.97.100.145/index.php/vadded/article/viewFile/726/780>.
- Nugroho, Helmi, Ianatu Solikha, Melinda Mutiara, Muhammad Haykal, Nabiilah nur Shabrina, Refki Adaniyah Tambak, Rivia Ramadatun Nisa, and Vira Yuniar. 2020. "PENGARUH SISTEM KEUANGAN EKONOMI PADA ERA ORDE BARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Academia.Edu*. [https://www.academia.edu/download/65173150/JURNAL\\_PEI\\_KELOMPOK\\_4.PDF](https://www.academia.edu/download/65173150/JURNAL_PEI_KELOMPOK_4.PDF).
- Nurmalaningrum, Rizka Wahyu, and Agustinus Dewantara. 2018. "Peristiwa Mundurnya Soeharto Dari Jabatan Presiden Indonesia." *INA-Rxiv*, 1-14. <https://osf.io/preprints/inarxiv/gvxzs>.
- Perdana, Ari A. 2001. "Peranan ' Kepentingan ' Dalam Mekanisme Pasar Dan Penentuan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia." *Economic Working Paper Series*, 1-18. <https://mukhyi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/9376/wpe061.pdf>.
- Pratama, Aswab Nanda. 2019. "11 Maret 1998, Saat Soeharto Dilantik Jadi Peresiden Untuk Kali Ketujuh." *Kompas.Com: Jernih Melihat Dunia*. 2019. <https://www.google.com/amp.compas.com/nasional/read/2019/03/11/084>

- 10371/11-maret-1998-saat-soeharto-dilantik-jadi-presiden-untuk-kali-ketujuh.
- Rickles, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Saidi, Zaidi. 1998. *Soeharto Menjaring Matahari: Tarik-Ulur Reformasi Ekonomi Orde Baru Pasca 1980*. Bandung: Mizan.
- Setiawan, Agus. 2009. "Kebijakan Moneter Pada Masa Pemerintahan Soeharto Tahun 1966-1971." Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sunariyah. 2016. "6 Fakta Penting Dari Kerusuhan 13-14 Mei 1998." Liputan6.Com. 2016. <https://m.liputan6.com/news/read/2505396/6-fakta-penting-dari-kerusuhan-13-14-mei-1998>.
- Syam, Nur. 2010. "JEJAK REFORMASI DALAM LINTASAN SOSIO-HISTORIS." Retrieved From Uinsby: <Http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/14244>, 1-11. <https://core.ac.uk/download/pdf/146816868.pdf>.
- Tarmidi, Lepi T. 1991. "Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF Dan Saran \* )." *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 1 (4): 1-25. <https://www.academia.edu/download/32406814/bempvol1no4mar.pdf>.
- Tim Penulis Indonesia Investments. 2019a. "Keajaiban Orde Baru Soeharto Di Indonesia." Indonesia Investments. 2019. <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/keajaiban-orde-baru/item247>.
- . 2019b. "Orde Baru Suharto: Pembangunan Di Bawah Pemerintahan Otoriter." Indonesia Investments. 2019. <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/orde-aruharto/item180?>
- Utami, Silmi Nurul. 2021. "Kebijakan Politik Masa Pemerintahan B.J Habibie." Kompas.Com : Jernih Melihat Dunia. 2021. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2021/03/29/144709069/kebijakan-politik-masa-pemerintahan-b-j-habibie?>
- Wijaya, Junior Hendri, and Iman Amanda Permatasari. 2018. "Capaian Masa Pemerintahan Presiden BJ . Habibie Dan Megawati Di Indonesia." *Cakrawala : Jurnal Litbang Kebijakan* 12 (2): 196-207. <http://cakrawala-journal.org/index.php/cakrawala/article/247>.
- Woyanti, Nenek, and Mulyo Budi Setiawan. 2006. "Dampak Utang Luar Negeri Dan PMA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pra Dan Pasca Krisis Moneter." *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi* 13 (I): 21-41. [https://eprints.undip.ac.id/33970/1/Dampak\\_utang\\_luar\\_negeri.pdf?](https://eprints.undip.ac.id/33970/1/Dampak_utang_luar_negeri.pdf?)